

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan yang disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan sebuah perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Informasi keuangan sangat dibutuhkan oleh pihak internal dan pihak eksternal sebagai pemakai laporan keuangan perusahaan. Suwardjono (2003) menyatakan bahwa pihak internal yaitu manajemen yang memerlukan informasi laporan keuangan untuk perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian operasi perusahaan. Sedangkan pihak eksternal terdiri dari investor, kreditor, pelanggan, pemasok, lembaga pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat umum.

Investor berkepentingan untuk menentukan apakah mereka sebaiknya menjual atau tetap memegang saham perusahaan. Kreditor berkepentingan untuk memutuskan apakah kredit kepada perusahaan dapat diperpanjang atau diperbesar. Lembaga pemerintah berkepentingan untuk mengevaluasi kewajiban pajak perusahaan dan menilai apakah perusahaan mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah. Pelanggan dan pemasok berkepentingan dengan informasi keuangan untuk mengevaluasi hubungan usaha dengan perusahaan dan menentukan kelanjutan hubungan di

masa datang. Masyarakat umum berkepentingan juga sebab aspek umum dan sosial perusahaan sebagai lembaga ekonomi masyarakat. Lembaga pendidikan berkepentingan dengan laporan keuangan untuk tujuan penelitian Suwardjono (2003).

Baik pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan mempunyai berbagai kepentingan, sehingga dapat menimbulkan pertentangan yang dapat merugikan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tersebut. Pertentangan dapat terjadi antara pihak-pihak tersebut dikemukakan oleh Jin dan Machfoedz (1998), antara lain pertama, manajemen berkeinginan meningkatkan kesejahteraannya sedangkan pemegang saham berkeinginan meningkatkan kekayaannya. Kedua, manajemen berkeinginan memperoleh kredit sebesar mungkin dengan bunga rendah, sedangkan kreditur hanya ingin memberi kredit sesuai dengan kemampuan perusahaan dan manajemen berkeinginan membayar pajak sekecil mungkin, sedangkan pemerintah ingin memungut pajak semaksimal mungkin.

Pada teori akuntansi, hubungan antara pihak internal dengan pihak eksternal dikenal dengan *agency theory* (teori keagenan) yang melibatkan dua pihak yaitu pihak *agent* dan pihak *principal*. Pihak *agent* merupakan pihak internal yang termotivasi meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan kompensasi, sedangkan pihak *principal* merupakan pihak eksternal yang termotivasi meningkatkan kesejahteraannya, misalnya melalui pembagian deviden atau kenaikan harga saham perusahaan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pihak internal dengan pihak eksternal perusahaan

memiliki berbagai kepentingan yang berbeda-beda, sehingga timbul konflik kepentingan antara kedua pihak tersebut.

Konflik kepentingan semakin meningkat ketika *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent* karena ketidakmampuan *principal* memonitor aktivitas *agent* dalam perusahaan, sedangkan *agent* mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent* yang dikenal dengan istilah asimetri informasi. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara *agent* dan *principal*, mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh *principal* dan menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada *principal* (Widyaningdyah, 2001). Tindakan tersebut dikenal dengan manajemen laba (*earnings management*). Manajemen laba merupakan upaya yang dilakukan pihak manajemen untuk melakukan intervensi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri (Schipper, 1989 dalam Kusuma, 2006).

Penelitian mengenai praktik manajemen laba telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan beragama alternatif metode pendekatan, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Phillips *et al.* (2003). Penelitian Phillips *et al.* (2003) memfokuskan pada beban pajak tangguhan untuk mendeteksi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Beban pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara

laba akuntansi (laba menurut Standar akuntansi Keuangan) dengan laba fiskal (laba aturan perpajakan yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak) (Yuliati, 2004). Suandy (2008) menyatakan bahwa beda temporer adalah perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (selanjutnya disebut dengan SAK) dengan peraturan perpajakan.

Perusahaan merupakan Wajib Pajak Badan (selanjutnya disebut dengan WP Badan) yang memiliki kewajiban setiap tahun untuk membayar Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut dengan PPh) kepada Pemerintah (pihak fiskus) atas Penghasilan Kena Pajak (selanjutnya disebut dengan PKP). Antara WP dan Pemerintah mempunyai perbedaan kepentingan dalam hal pembayaran pajak. Bagi WP Badan, membayar pajak berarti akan mengurangi kemampuan ekonomis WP, oleh karena itu WP Badan akan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, sedangkan Pemerintah memerlukan dana dari penerimaan pajak untuk menyelenggarakan pemerintahan. Bagi suatu perusahaan, pajak yang ditanggung merupakan suatu elemen biaya yang mengurangi laba perusahaan, karena semakin tinggi pajak yang ditanggung oleh suatu perusahaan berarti semakin kecil pula laba yang akan didapatkan perusahaan tersebut, sehingga timbul suatu kecenderungan untuk meminimalkan pembayaran pajak. Upaya meminimalkan pajak sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering* (Suandy, 2008).

Mangoting (1999) mendefinisikan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik PPh maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan sesuatu yang legal karena diperbolehkan oleh pemerintah selama dalam koridor Undang-undang perpajakan.

Jumlah pajak terutang dihitung berdasarkan besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan setiap tahunnya dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Karena pajak berhubungan langsung dengan laba, di mana laba sering digunakan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan berbagai pihak yang berkepentingan, maka manajemen memanfaatkan peluang untuk melakukan manajemen laba dengan rekayasa akrual untuk meminimalkan jumlah pajak. Setyowati (2002) mengungkapkan bahwa manajemen sering memanfaatkan peluang untuk memainkan angka laba dalam rangka mempengaruhi hasil akhir dari berbagai keputusan, salah satu contohnya manajemen berusaha meminimalkan pajak yang semestinya mereka bayar, dengan cara meningkatkan akrual untuk menjadikan angka laba lebih rendah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Praktik Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan menggunakan dasar akrual yang sesuai dengan isi dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 (selanjutnya disebut dengan PSAK No. 1). PSAK No. 1 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007) menyatakan bahwa perusahaan harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Isi dari PSAK No. 1 menyatakan juga bahwa dalam akuntansi akrual, aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan dan beban diakui pada saat kejadian bukan saat kas atau setara kas diterima dan dicatat serta disajikan dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Namun, di sisi lain penggunaan dasar akrual dapat memberikan keleluasaan bagi pihak manajemen dalam memilih metode akuntansi selama tidak menyimpang dari aturan SAK. Metode akuntansi yang sengaja dipilih oleh manajemen untuk tujuan tertentu mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan perilaku yang tidak semestinya yang dikenal dengan *earnings management* atau manajemen laba.

Model akrual (*unexpected accrual* dan *spesific accrual*) merupakan salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam mendeteksi manajemen laba. Healy (1985) menguji manajemen laba dengan membandingkan rata-rata *total accrual* setiap periode penelitian sebagai ukuran *non-discretionary*. DeAngelo (1986) menggunakan metode serupa namun dengan menggunakan total akrual satu periode sebelumnya sebagai ukuran *non-discretionary accrual*. Jones (1991) mengasumsikan metode *non-discretionary accrual*

adalah tetap di setiap periode (Setiawati dan Na'im, 2000). Namun, penggunaan *discretionary accruals* tersebut memiliki kesalahan dalam mendeteksi manajemen laba, seperti yang dibuktikan dalam penelitian Bernard dan Skinner (1996) mengenai manajemen laba.

Bernard dan Skinner (1996) menyatakan bahwa kesalahan penggunaan *discretionary accruals* disebabkan adanya kesalahan mengklasifikasikan *total accruals* ke dalam bentuk *discretionary accruals* dan *non-discretionary accruals* sehingga model tersebut tidak lagi tepat digunakan. Selain itu, Bernard and Skinner (1996) juga menjelaskan bahwa pengklasifikasian *total accruals* ke dalam bentuk *discretionary accruals* dan *non-discretionary accruals* rentan terhadap kesalahan. Kesalahan dalam pengklasifikasian tersebut mengakibatkan penilaian terhadap laba perusahaan menjadi bias. Dengan demikian, perlu ditemukan suatu model baru untuk mengidentifikasi adanya manajemen laba.

Phillips *et al.* (2003) menyatakan bahwa kesalahan pengukuran model akrual dapat dikurangi dengan memfokuskan pada beban pajak tangguhan dibandingkan dengan membagi *total accruals* perusahaan menjadi komponen *discretionary* dan *non-discretionary*. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba menurut SAK) dengan laba fiskal (laba menurut aturan perpajakan yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak) (Yuliati, 2004). Suandy (2008) menyatakan bahwa beda temporer adalah perbedaan yang disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode

pengakuan penghasilan dan beban tertentu berdasarkan standar akuntansi dengan peraturan perpajakan. Perbedaan ini memberikan keleluasaan bagi manajer melakukan manajemen laba dalam menentukan prinsip dan asumsi akuntansi untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Secara empiris pengaruh beban pajak tangguhan terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan dapat diuji sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti dari luar negeri yaitu Mills dan Newberry (2001), Holland dan Jackson (2002) serta Phillips *et al.* (2003), dan peneliti dari dalam negeri yaitu Yuliati (2004), Setiowati (2007) dan Lestari (2008).

Mills dan Newberry (2001) meneliti antara perbedaan laba komersial dengan laba fiskal (*book-tax differences*) dengan insentif pelaporan keuangan selama tahun 1981-1996. Holland dan Jackson (2002) meneliti hubungan beban pajak tangguhan terhadap adanya indikasi perusahaan melakukan manajemen laba pada 58 perusahaan di Inggris untuk periode dua tahun. Phillips *et al.* (2003) menguji model akrual dan beban pajak tangguhan untuk mendeteksi praktik manajemen laba pada perusahaan di Amerika Serikat untuk periode 1994-2004. Penelitian yang dilakukan oleh Phillips *et al.* (2003) tersebut dibangun berdasarkan bukti manajemen laba pada penelitian Mills dan Newberry (2001).

Yuliati (2004) menguji beban pajak tangguhan dan model akrual dalam memprediksi praktik manajemen laba untuk menghindari kerugian dengan menggunakan 446 sampel perusahaan manufaktur dan non-manufaktur

yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada periode 1999-2002. Selain itu, Yuliati (2004) melakukan pengujian tambahan dengan membandingkan kemampuan antara beban pajak tangguhan dan model akrual dalam memprediksi manajemen laba untuk menghindari pelaporan kerugian. Setiowati (2007) menguji beban pajak tangguhan, model akrual dan ROA (*Return on Assets*) dalam memprediksi adanya praktik manajemen laba untuk menghindari penurunan laba pada perusahaan non-manufaktur pada periode 2001-2007. Lestari (2008) menggunakan sampel perusahaan manufaktur periode 2001-2007 dan menguji beban pajak tangguhan dan ROA dalam mendeteksi manajemen laba untuk menghindari penurunan laba.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu Mills dan Newberry (2001), Holland dan Jackson (2002) serta Phillips *et al.* (2003), dan peneliti dari dalam negeri yaitu Yuliati (2004), Setiowati (2007) dan Lestari (2008). Beberapa penelitian terdahulu, istilah hubungan yang dimaksud adalah hubungan kausal atau sebab akibat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan istilah pengaruh untuk menggantikan kata sebab akibat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini tidak menggunakan model akrual dan ROA, tetapi hanya menggunakan variabel beban pajak tangguhan sebagai salah satu variabel independen untuk mendeteksi praktik manajemen laba.

Pada penelitian ini, penulis juga menguji secara terpisah beban pajak tangguhan tahun 2008 dengan beban pajak tangguhan tahun 2009. Alasan dilakukan pengujian secara terpisah antara tahun 2008 dengan tahun 2009,

karena penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi manajemen laba setiap tahun, dalam hal ini tahun 2008 dan 2009. Tahun 2008 dan tahun 2009 digunakan oleh penulis, karena pada tahun 2001 sampai tahun 2007 sudah diuji oleh Lestari (2008) dengan jenis perusahaan yang sama yaitu perusahaan manufaktur, sehingga pada penelitian ini tidak lagi menggunakan periode 2001-2007. Selain itu, dalam penelitian ini tahun 2008 dan tahun 2009 diuji secara terpisah karena tarif pajak tahun 2008 dan tarif pajak 2009 berbeda, sehingga data mengenai beban pajak tangguhan tahun 2008 tidak dapat digabungkan dengan data mengenai beban pajak tangguhan tahun 2009.

Walaupun dalam penelitian ini manajemen laba diukur menggunakan distribusi perubahan laba, tetapi penulis tidak membedakan tujuan manajemen melakukan manajemen laba untuk menghindari penurunan laba ataupun untuk menghindari pelaporan kerugian laba seperti yang telah dilakukan oleh Phillips *et al.* (2003). Hal tersebut dilakukan karena menurut pendapat penulis kedua tujuan tersebut menggunakan teknik dan jenis manajemen laba yang sama.

Perusahaan memiliki kewajiban setiap tahun untuk membayar pajak kepada Pemerintah. Bagi suatu perusahaan, pajak yang ditanggung merupakan suatu elemen biaya yang mengurangi laba perusahaan, karena semakin tinggi pajak yang ditanggung oleh suatu perusahaan berarti semakin kecil pula laba yang akan didapatkan perusahaan tersebut, sehingga timbul suatu kecenderungan untuk meminimalkan beban pajak. Dalam

meminimalkan beban pajak tersebut diperlukan suatu strategi yang dengan melalui suatu proses yang disebut dengan perencanaan pajak.

Pada awal bulan September 2008 pemerintah telah menyetujui perubahan peraturan Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut dengan PPh) yang keempat kalinya yaitu Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut dengan (UU No. 36 Tahun 2008) yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2009 dan sebagai pengganti Undang-undang No. 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU No. 17 Tahun 2000), sehingga tarif PPh mengalami perubahan. Khusus untuk wajib pajak badan sebelumnya berlaku tarif progresif yaitu 10%, 15% dan 30% (UU No. 17 tahun 2000 pasal 17 ayat (1b)), maka berdasarkan Pasal 17 ayat (1b) UU No. 36 Tahun 2008 Wajib Pajak Badan dikenakan tarif tunggal sebesar 28% (Hardi Cheng, 2009).

Perubahan tarif PPh progresif (selanjutnya disebut dengan tarif pajak progresif) menjadi tarif PPh tunggal (selanjutnya disebut dengan tarif pajak tunggal) dapat meringankan beban wajib pajak badan untuk membayar PPh, tetapi juga dapat memberikan peluang kepada manajemen untuk melakukan manajemen laba dalam rangka merespon perubahan tarif pajak progresif menjadi tarif pajak tunggal. Karena tarif pajak yang dikenakan pada periode mendatang lebih kecil, maka manajemen akan melakukan manajemen laba dengan menunda pengakuan laba pada periode tersebut untuk diakui pada periode tarif pajak baru telah berlaku. Hal tersebut dilakukan oleh manajemen dengan tujuan supaya perusahaan dapat meminimumkan beban PPh pada tahun fiskal sebelum tarif pajak baru berlaku.

Hardi Cheng (2009) menyatakan bahwa dalam Pasal 17 ayat (2a) UU No. 36 Tahun 2008 mengatur lebih lanjut bahwa tarif pajak untuk wajib pajak badan mulai tahun 2010 berlaku menjadi 25%. Kejadian penurunan tarif pajak tunggal tersebut juga menjadi peluang bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba dalam rangka meminimumkan beban PPh melalui perencanaan pajak.

Penelitian mengenai respon manajemen terhadap perubahan tarif PPh telah diuji oleh peneliti terdahulu. Peneliti yang berasal dari luar negeri yaitu Guenther (1994) dan Maydew (1997). Guenther (1994) meneliti adanya motivasi pajak yang mendorong manajemen melakukan praktik manajemen laba dalam merespon *Tax Reform Act* (TRA) pada tahun 1986 di Amerika Serikat. Guenther menguji adanya perilaku manajemen laba yang memanfaatkan peraturan perpajakan TRA di Amerika Serikat untuk meminimumkan beban PPh. Maydew (1997) melakukan penelitian pada perusahaan yang mengalami *net operating loss* untuk periode 1986-1991 dengan menguji penghematan pajak berhubungan dengan manajemen laba dalam rangka merespon TRA pada tahun 1987. Di Amerika Serikat, perusahaan yang mengalami *net operating loss* diijinkan untuk mengkompensasikan rugi operasi tersebut dengan laba 3 tahun sebelumnya atau dengan laba 15 tahun yang akan datang.

Penelitian dari dalam negeri dilakukan oleh Setyowati (2002), Hidayati dan Zulaikha (2003), Wulandari dkk. (2004) serta Ratna (2006). Setyowati (2002) menguji perilaku manajemen laba di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dalam merespon perubahan peraturan PPh yaitu UU No. 10 tahun 1994 (mulai berlaku tahun 1995) yang memberikan peluang pada perusahaan untuk menikmati penghematan pajak dan juga memicu manajer untuk melakukan rekayasa akrual. Setyowati juga membandingkan rekayasa akrual yang dilakukan manajer sebelum tarif pajak berlaku (tahun 1994) dan sesudah tarif pajak berlaku (tahun 1995).

Penelitian yang dilakukan Hidayati dan Zulaikha (2003), Wulandari dkk. (2004) serta Ratna (2006) sama dengan penelitian Setyowati (2002), tetapi terdapat perbedaan yaitu perubahan tarif PPh yang digunakan adalah UU No. 17 tahun 2000. Setyowati (2002), Hidayati dan Zulaikha (2003), Wulandari dkk. (2004) serta Ratna (2006) sama-sama menggunakan pendekatan *discretionary accruals* untuk mendeteksi praktik manajemen laba dalam rangka merespon perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut dengan UU PPh) di Indonesia dan membandingkan periode sebelum terjadinya perubahan dengan periode sesudah terjadinya perubahan UU PPh.

Implikasi lain dengan adanya perencanaan pajak adalah tingkat pengembalian atas ekuitas saham biasa perusahaan semakin meningkat atau disebut dengan *return on common shareholders equity* (selanjutnya dalam penelitian ini disingkat dengan ROCE). Hal tersebut dapat terjadi karena

dengan adanya perencanaan pajak maka beban pajak perusahaan dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga menyebabkan jumlah laba bersih menjadi naik. Laba bersih inilah yang digunakan oleh investor untuk menghitung ROCE sebagai perhitungan tingkat pengembalian yang akan diperoleh investor di mana mendatang. Oleh karena itu, apabila laba bersih perusahaan tinggi, maka ROCE juga akan semakin tinggi, sehingga investor akan tertarik untuk membeli saham perusahaan. Hal tersebut yang memotivasi manajemen untuk melakukan manajemen laba, seperti yang telah diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Utami (2005) yang menguji pengaruh manajemen laba terhadap biaya modal ekuitas, dengan menggunakan akrual modal kerja sebagai proksi manajemen laba. Utami (2005) mengungkapkan bahwa biaya modal ekuitas merupakan tarif diskonto yang digunakan investor untuk menilaitunaikan arus kas yang akan diterima di masa yang akan datang.

Konsep pengujian kedua dalam penelitian ini hampir sama dengan konsep penelitian yang dilakukan oleh Guenther (1994), Maydew (1997), Setyowati (2002), Hidayati dan Zulaikha (2003), Wulandari dkk. (2004) serta Ratna (2006). Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah dari segi variabel penelitian, di mana dalam penelitian ini menggunakan variabel perencanaan pajak untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel manajemen laba. Perbedaan lainnya dengan penelitian sebelumnya adalah data tahun 2008 dan data tahun 2009 diuji secara terpisah, sehingga hipotesis alternatif pengujian kedua ini terdiri dari dua yaitu perencanaan pajak tahun

2008 terhadap manajemen laba tahun 2008 dan perencanaan pajak tahun 2009 terhadap manajemen laba tahun 2009. Hal tersebut dilakukan karena tarif pajak tunggal tahun 2009 berbeda dengan tarif pajak tunggal tahun 2010. Dengan demikian, data tahun 2008 digunakan untuk melihat dan menguji respon manajemen terhadap adanya perubahan tarif pajak progresif (30%) menjadi tarif pajak tunggal (25%), sedangkan data tahun 2009 digunakan untuk melihat dan menguji respon manajemen terhadap penurunan tarif pajak tunggal dari 25% menjadi 28%. Kedua hal tersebut dilakukan oleh manajemen untuk meminimumkan beban PPh serta meningkatkan ROCE.

Pengujian kedua dalam penelitian ini hanya melihat dari perencanaan pajak terhadap praktik manajemen laba dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak, tanpa menggunakan unsur akrual seperti yang dilakukan pada penelitian Setyowati (2002). Oleh karena itu, penulis tidak membedakan perusahaan yang memiliki laba sebelum pajak dan laba bersih bernilai positif dengan laba sebelum pajak dan laba bersih bernilai negatif, sehingga dalam penelitian ini diasumsikan semua sampel perusahaan memiliki laba sebelum pajak dan laba bersih bernilai positif. Selain itu, tarif pajak tahun 2008 dalam menghitung beban pajak tangguhan semua perusahaan dikenakan sebesar 30%, tanpa melihat nilai PKP perusahaan. Hal inilah yang menjadi dasar penulis mengasumsikan semua sampel perusahaan memiliki laba sebelum pajak dan laba bersih bernilai positif.

Konsep dasar pengujian kedua ini juga sama dengan konsep yang terdapat pada penelitian Utami (2005). Namun, dalam penelitian ini pengujian hanya difokuskan pada segi perencanaan pajak terhadap praktik manajemen laba, di mana perencanaan pajak ini pada dasarnya dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan ROCE.

Variabel perencanaan pajak diukur dengan *tax retention rate* (tingkat retensi pajak) yang menganalisis suatu ukuran dari efektifitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan (Wild *et al.*, 2004). Dalam penelitian ini, ukuran efektifitas manajemen pajak sama dengan ukuran efektifitas perencanaan pajak, karena perencanaan pajak merupakan bagian dan langkah awal dari manajemen pajak yang berhubungan langsung dengan laporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh beban pajak tangguhan terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 ?
2. Apakah ada pengaruh beban pajak tangguhan terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 ?

3. Apakah ada pengaruh perencanaan pajak terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 dalam rangka merespon perubahan tarif pajak progresif menjadi tarif pajak tunggal ?
4. Apakah ada pengaruh perencanaan pajak terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 dalam rangka merespon penurunan tarif pajak tunggal dari 28% menjadi 25% ?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas sehingga penelitian lebih fokus pada permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini. Adapun batasan masalah penelitian ini adalah :

1. Perusahaan manufaktur yang sudah *go public* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2008 - 2009 yang dinyatakan dalam rupiah (Rp).
2. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan per 31 Desember 2007 sampai dengan laporan keuangan per 31 Desember 2009. Laporan keuangan per 31 Desember 2007 digunakan untuk menghitung distribusi laba perusahaan tahun 2008.
3. Data yang tersedia lengkap (data secara keseluruhan tersedia pada publikasi periode 31 Desember 2008 - 31 Desember 2009), baik data yang berhubungan dengan beban pajak tangguhan, perencanaan pajak dan manajemen laba.

4. Perusahaan manufaktur yang memiliki akun beban pajak tangguhan pada periode 2008 - 2009.
5. Perusahaan tidak melakukan merger dan akuisisi sebab laporan keuangan yang disajikan dan kinerja perusahaan akan berbeda.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang digunakan untuk mencapai sasaran dari berbagai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh beban pajak tangguhan terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh beban pajak tangguhan terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 dalam rangka merespon perubahan tarif pajak progresif menjadi tarif pajak tunggal.

4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 dalam rangka merespon penurunan tarif pajak tunggal dari 28% menjadi 25%.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sarana untuk menerapkan teori yang telah penulis peroleh selama masa kuliah sehingga dapat memperluas wawasan serta memperdalam teori dengan melihat ke dalam praktik yang ada.

2. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian serupa.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : BEBAN PAJAK TANGGUHAN, PERENCANAAN PAJAK DAN MANAJEMEN LABA

Bab ini berisi pembahasan mengenai pajak tangguhan, manajemen pajak, manajemen laba, hubungan beban pajak tangguhan dengan praktik manajemen laba, peran perencanaan pajak dalam praktik manajemen laba, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis serta ikhtisar pembahasan. Penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu (1) pengaruh beban pajak tangguhan terhadap praktik laba dan (2) pengaruh perencanaan pajak terhadap praktik manajemen laba.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang populasi dan sampel, data dan sumber data, definisi operasional variabel dan pengukurannya serta metode analisis data. Metode analisis data dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu statistik deskriptif dan analisis statistik. Analisis statistik terdiri dari uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

BAB IV : ANALISIS DATA

Analisis data membahas tentang statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, pengujian hipotesis dan pembahasan. Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Sedangkan pengujian hipotesis terdiri dari dua yaitu pengujian hipotesis alternatif pertama dan pengujian hipotesis alternatif kedua.

BAB V : PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran. Keterbatasan penelitian merupakan kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini, sedangkan saran mengacu pada keterbatasan penelitian ini untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.